DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Vol. 8, No. 1, Hal: 1-12
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2018). Laporan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah UPPD Triwulan II Tahun 2018.Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota SeJawa Tengah 2018-2022. Diakses dari https://jateng.bps.go.id/publication.html.
- Bougie, & Sekaran. (2013). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Bougie, & Sekaran. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate. Semarang: UNDIP.
- Ghozali (2021) Buku SPSS verse 26
- Halim, A., Icuk, A. B., & Amin, D. (2016). Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan, Edisi Revisi Yogyakarta: Andi CW.
- Nugrahwati E,R. Marwoto, P, B.& Mulyani, H, T. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2003). Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Diakses dari https://bppd.jatengprov.go.id/pajak-daerah/.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2004). Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari https://bppd.jatengprov.go.id/pajak-daerah/.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2011). Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari https://bppd.jatengprov.go.id/pajakdaerah/.

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2015). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diakse.darih ttps://bppd.jatengprov.go.id/pajak -daerah/.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2017). Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari https://bppd.jatengprov.go.id/pajakdaerah/.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2017). Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari https://bppd.jateng.prov.go.id/pajak-daerah/.
- Priyastama, R. (2017). Pengolahan Data dan Analisis Data SPSS. Bantul: PT Anak Hebat Indonesia.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangker, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi
- Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol. 15, No. 2015, Hal: 51-62.
- Robbins, C. S.P, & Judge. (2007). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruslinda Agustina, R. A. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012.
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No.1, Hal: 83-98.
- Siahaan, M. P. (Jakarta). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2015: Rajawali.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. (2004). UndangUndang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (2009). Peraturan UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.Diakses dari https://bppd.jatengprov.go.id/pajak-daerah.
- Waani, I. G. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 4, Hal: 667-675.
- Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172, Vol. 2, Hal : 70-79